Prinsip Keadilan Dan Kedaulatan Rakyat Pada Kasus Gagalnya Partai Politik Dalam Memenuhi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Pada Pemilu 2024

Muh Adhy Maykur W, Mohammad Arif, Muhammad Ya'rif Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: muhadhymasykurw@gmail.com

Abstract:

This research aims to understand and analyze how the principles of justice and the principle of popular sovereignty relate to legislative candidates from political parties that are unable to meet the parliamentary threshold, as well as to determine and analyze how the representation of voters for legislative candidates from political parties that do not meet the parliamentary threshold will be in the 2024 general election. The research method used by the author is normative legal research, involving secondary data in the form of literature studies and journals related to the principles of justice and popular sovereignty as well as the parliamentary threshold in the 2024 elections. Based on the research findings, the author found that the principles of justice and popular sovereignty in political parties participating in the 2024 general election have not been fully implemented as they should be; justice, which is the people's fundamental right regarding popular sovereignty, is obstructed by the rules of the parliamentary threshold applied, thus political parties are unable to fully represent the aspirations of the community. The study recommendations suggest that the House of Representatives, as the institution that designs and ratifies laws, should further examine the parliamentary threshold regulations that affect the increase in the number of votes that are wasted or not converted into seats in the House of Representatives, the parliamentary threshold that also limits sovereignty and is unfair to legislative candidates. Keywords: Justice, People's Sovereignty, Parliamentary Threshold, Political Parties.

Keywords: Justice, People's Sovereignty, Parliamentary Threshold, Political Parties.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prinsip keadilan dan prinsip kedaulatan rakyat terhadap calon anggota legislatif pada partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana representasi keterwakilan pemilih calon anggota legislatif dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen pada pemilihan umum tahun 2024. Metode Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian Hukum Normatif yang berupa perundang-undangan data sekunder yaitu studi kepustakaan dan jurnal yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat serta ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil penelitian penulis

menemukan bahwa prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat pada partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 belum telah terlaksana sebagaimana mestinya, keadilan yang merupakan hak dasar rakyat atas kedaulatan rakyat tersebut terhalang oleh aturan ambang batas parlemen yang diterapkan, sehingga partai politik tidak mampu merepresentasikan secara menyeluruh aspirasi masyarakat. Rekomendasi penelitian menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perancang dan pengesahan Undang-undang harus mengkaji lebih lanjut terkait aturan ambang batas parlemen yang berpengaruh pada peningkatan jumlah suara yang terbuang atau tidak terkonfersi menjadi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, Ambang batas parlemen yang juga membatasi kedaulatan serta berlaku tidak adil pada calon anggota legislatif.

Kata Kunci: Keadilan, Kedaulatan Rakyat, Ambang Batas Parlemen, Partai Politik

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini didukung dengan pemenuhan salah satu kriteria Negara demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden serta dewan perwakilan rakyat dan jabatan-jabatan publik lainnya yang melibatkan peran masyarakat secara aktif, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Joseph Schumpeter bahwa demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya para individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.¹

Suara rakyat yang juga menjadi symbol kedaulatan rakyat yang dibuktikan melalui pemilu. Pemilu di Indonesia menjadi ajang kontestasi partai politik dalam menggait suara sebanyak banyak untuk memenangkan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan di Negara Indonesia

Negara demokrasi juga tidak terlepas dari suatu system pemerintahan yang menempatkan kepentingan atau kekuasaan rakyat sebagai pokok utama dalam mengambil setiap keputusan terutama dalam mengambil keputusan yang bersifat politis.

Sedangkan menurut C. F. Strong Demokrasi adalah suatu system pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Berangkat dari penjelasan ahli diatas dapat diambil benang merah hubungan dan keterkaitan antara demokrasi, kekuasaan, perjuangan kompetitif, perwakilan dan Rakyat sebagai peran utama dalam system demokrasi.²

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berjalan berdampingan dengan Negara Nomokrasi atau Negara hukum, sebagai Negara hukum Indonesia harus bisa memenuhi asas tujuan hukum salah satu diantaranya

¹ Larry Diamond, (2003). *Developing Democracy Toward Consolidation*, Jogjakarta, IRE, hlm 9.

² C.F Strong, (2004). *"Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk Bentuk Konstitusi Dunia"*, Bandung, Nuansa, hlm 10.

yaitu asas keadilan yang juga merupakan salah satu nilai dalam Pancasila yaitu pada butir Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud diharapkan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, dalam beberapa kasus kerap kali keadilan baik bagi pelaku maupun korban tidak jarang kabur atau tidak ditemukan sebagaimana prinsip-prinsip keadilan.

Keadilan tidak hanya berbicara antar individu melainkan dapat melibatkan kelompok tertentu tidak terkecuali partai politik dan simpatisan partai politik yang menjadi kelompok yang kerap merasa tidak mendapatkan keadilan dalam kontestasi politik baik pada tingkatan pusat maupun pada tingkat daerah.

Keadilan juga kerap menjadi hal yang sulit dicerna maupun dapat dimaknai secara luas dalam ruang lingkup politik di Negara Indonesia, ketidakadilan yang terjadi dalam ruang lingkup politik di Negara ini kebanyakan terjadi pada tahapan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

Negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang menerapkan demokrasi Pancasila dimana konsep demokrasi yang dianut berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi Pancasila juga memiliki arti demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

Dalam pelaksanaan proses demokrasi yang sah dan memperoleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil hal ini juga diatur dalam Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Salah satu mekanisme demokrasi adalah pemilihan umum, dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana yang telah diatur pada UUD 1945 harus mengedepankan prinsip adil atau berkeadilan dalam surah Al Maidah ayat 8 yang berbunyi

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah menjadi saksi-saksi (yang bertindak) adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Surah diatas juga telah menerangkan betapa pentingnya menerapkan prinsip keadilan dan berlaku adil atas apa yang menjadi hak orang lain.

Dalam pelaksanaan demokrasi juga menerapkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dalam kontestasi pemilihan baik presiden maupun wakil presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disuatu Negara kedaulatan rakyat

sebagaimana aturan Undang Undang dasar yaitu pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan yang berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar salah satu pasal yang menerangkan terkait pengimplementasian kedaulatan rakyat yaitu pasal 22 E UUD yang menjabarkan terkait Pemilu dalam kontestasi pemilu telah diatur peraturan terkait mekanisme pemilu salah satunya aturan terkait ambang batas pemilu yang tertuang dalam pasal 414 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu.

Suara suara rakyat yang diwakilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik pada Dewan Perwakilan Rakyat Pusat maupun pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, kabupaten/ kota diharapkan mampu diwakilkan sesuai dengan penempatan komisi Anggota dewan yang terpilih.

Dalam kedudukannya Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kedudukan yang setara dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal ini ada perbedaan antara anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah dari segi format pemilihan dan sistem pemilihan yang berbeda antara dewan perwakilan rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian dari lembaga legislatif Negara yang keanggotaannya berasal dari anggota partai politik yang dipilih langsung oleh rakyat dan memenuhi syarat sesuai dengan prosedur pemilu dewan perwakilan rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perwakilan dari setiap provinsi yang juga dipilih melalui pemilihan umum.

Permasalahan umum sebuah Negara yang menerapkan sistem multi partai adalah stabilitas politik yang lemah akibat jumlah partai, pemerintahan yang disokong oleh beberapa partai yang tidak mencapai perolehan dukungan mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan sering tidak dijalankan secara transaksional sehingga berdampak pada kerugian rakyat. Oleh karena itu timbul peikiran tentang sistem multipartai sederhana untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Masyarakat terbuka seharusnya diperjuangkan sebagai pilar dasar dari gerakan partai politik, mengingat hanya dalam masyarakat seperti inilah akan ditemui kehidupan politik yang lebih demokratis.³

Cara yang dianggap paling efektif untuk menyederhanakan partai tersebut adalah dengan menerapkan ambang batas parlemen.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 414 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, ambang batas pemilu atau *parliamentary threshold* perolehan suara 4% hanya berlaku untuk DPR saja ini merupakan hasil dari permohonan yang telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ Agung Djojosoekarto,Utama Sandjaja. (2008). *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*, Michigan, Partnership for Governance Reform dan Strategic Transformation Institute,hlm 147.

⁴ Yogo Pamungkas. (2014). "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadp Undang-undang Dasar 1945", *Jurnal Rechts Vinding*,1(3),hlm.34.

Ambang batas parlemen 4% bertujuan untuk menyederhanakan partai, dengan partai yang lebih sedikit diharapkan pemerintahan akan menjadi stabil dan efektif, namun jika hanya untuk membatasi jumlah partai politik

Yang duduk diparlemen dengan alasan tersebut orde baru telah menerapkannya dengan mengurangi partai politik dari sekian banyak partai disederhanakan menjadi 10 kemudian disederhanakan lagi hingga hanya tersisa 10 partai namun hal ini malah menjadikan prinsip keterwakilan melemah dan menghadirkan pemerintahan yang diktator.

Ambang batas parlemen di Indonesia juga kerap menuai kontroversi seiring berjalannya waktu setiap kali kontestasi pemilu lima tahun ambang batas parlemen sekan menjadi permasalahan yang timbul dan tenggelam seiring kepentingan dan dinamika politik tidak lagi menjadi dasar acuan atau menjadi kebijakan yang didasari oleh kepentingan rakyat, juga seiring waktu belum didapati ataupun dirasakan langsung oleh rakyat terkait imbas baik dari penerapan ambang batas parlemen itu sendiri.

Terkait suara rakyat sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat yang dicerminkan melalui pemilu namun tidak terwakilkan akibat gagalnya calon anggota legislatif yang mereka dukung kegagalan dari anggota legislatif tersebut adalah imbas dari adanya aturan terkait ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, di beberapa daerah pemilihan terdapat calon anggota legislatif dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tetapi memenuhi suara perorangan dalam perhitungan suara pada daerah pemilihan yang menjadi syarat seorang calon anggota legislatif untuk dapat duduk sebagai seorang legislator di senayan dari hal ini muncul pertanyaan besar bagaimana penerapan prinsip keadilan yang telah diatur dalam pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 terhadap calon anggota legislatif yang dimaksud serta bagaimana representasi suara rakyat yang telah dititipkan keterwakilannya kepada calon anggota legislatif tersebut. Sehubungan dengan uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “Prinsip Keadilan Dan Kedaulatan Rakyat Pada Kasus Gagalnya Partai Politik Dalam Memenuhi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Pada Pemilu 2024 “

METODE

Tipe penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan data sekunder yaitu studi kepustakaan dan jurnal yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat serta ambang batas parlemen pada pemilu 2024.

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peater Mahmud Marzuki,⁵ penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulis membuat konsep mengenai ambang batas parlemen pada pemilu 2024 dengan penerapan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat pada studi kasus gagalnya partai politik dalam memenuhi ambang batas parlemen pemilu 2024. Penulis mencari konsep dengan berpatokan peraturan perundang undangan terkait, teori, serta kondisi lapangan.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Yakni dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan memiliki politik hukum yang berkaitan dengan pemilu.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Dengan cara membandingkan data hasil pemilu legislatif sebelum dan sesudah penerapan ambang batas parlemen serta data perolehan suara partai politik dari masa ke masa.

a. Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, pendapat para sarjana hukum, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan hukum yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini.

Analisis bahan hukum adalah tentang bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang sudah terakumulasi untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Analisis penelitian ini dibuat dengan cara membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan kajian pustaka serta dengan pikiran sendiri. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Keadilan dan Kedaulatan Rakyat Terhadap Aturan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Thereshold*) Pada Pemilu 2024

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2005), Penelitian Hukum, Jakarta ,Prenada Media,hlm.35

Kita ketahui bersama bahwa dalam negara demokrasi pemilu merupakan sistem yang wajib dijalankan, Dalam sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia kita ketahui bersama sistem ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold kerap kali kita dengarkan penyebutannya lantas bagaimanakah konsep dari pada sistem parliamentary threshold tersebut, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold lahir dari upaya negara dalam menyelesaikan problematik multipartai di Indonesia seiring berjalannya waktu tantangan sistem ambang batas parlemen pada pemilihan umum menjumpai tantangan baru diantaranya ketidaksesuaian prinsip pemilihan umum dengan sistem parliamentary threshold dimana dalam mekanisme pemilihan umum terdapat prinsip yang harus dijalankan prinsip sendiri memiliki arti pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh individu atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak ⁶.

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dimana salah satu bentuk kedaulatan rakyat yaitu pemilihan umum disatu sisi dalam pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 juga telah disebutkan salah satu prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu prinsip keadilan namun dalam pelaksanaannya kerap kali kita menemukan bahwa keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum kerap kali tidak sesuai, salah satunya penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilihan umum serta menggoyahkan kedaulatan atas rakyat.

1. Prinsip Keadilan

Dalam pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 telah termaktub bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil, Prinsip keadilan dalam konstitusi terkait pemilu menunjukkan bahwa perwujudan Negara hukum yang demokratis sebagaimana yang telah diamanatkan haruslah dilakukan secara berkeadilan⁷, keadilan pemilihan umum dapat tercipta jika setiap pihak baik individu maupun kelompok mengambil peran aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 bahwa tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu salah satunya untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas untuk Partisipan pemilu dari partai politik yang menjadi kontestan pada pemilihan umum juga seharusnya mendapatkan keadilan salah satu contoh nyata yaitu kegagalan partai politik dalam memenuhi ambang batas parlemen yang telah diatur dalam Pasal 414 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 “Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Fadli Ramadani dalam sidang uji ambang batas parlemen pada Mahkamah Konstitusi mengatakan ketika pemilu di Indonesia menegaskan

⁶ Arya.(2023,1 Februari). Pengertian Prinsip. *Wikipedia*. Diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

⁷ Muhammad Zarwan. (2020). Pengawasan Dana Kampanye, Biaya Politik Tinggi dan Transaksional. *Jurnal Keadilan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat*, 1(2), hlm.1

bahwa sistem pemilu legislatifnya menggunakan sistem proporsional, tetapi hasilnya tidak proporsional, arena persentase suara yang diperoleh partai politik tidak selaras dengan persentase perolehan kursi di parlemen.⁸

Aristoteles telah membagi keadilan dalam keadilan komutatif dan keadilan distributif, keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing-masing.⁹ Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan dan keuntungan sosial secara proporsional. Berbeda dengan distribusi yang sama rata, aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan dan nilai sosial individu. Sedangkan pada keadilan komutatif aristoteles menerangkan bahwa keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Dalam prinsip keadilan yang telah dikemukakan oleh aristoteles keadilan pemilu seharusnya menggunakan keadilan komutatif, memberikan hak setiap warga untuk memilih dan terpilih yang artinya keadilan dapat tercipta jika masyarakat yang memilih dan calon anggota legislatif yang telah terpilih dapat mendapatkan haknya seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Dilain sisi Plato memeberikan klasifikasi makna keadilan yaitu sebagai karakteristik atau sifat yang terbit secara alami dalam diri setiap individu, kemudian keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian atau penataan serta memberi Batasan pada Tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan tempat ia bergaul dan terakhir keadilan merupakan hal yang memungkinkan Masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam car acara yang utuh dan semestinya.¹⁰

Dalam konteks hukum keadilan terkait erat dengan makna legalitas dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.

Secara hukum legalitas terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.

Hart mengemukakan, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum dan ketidaksetaraan.¹¹ Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu,

⁸ Utami Argawati. (2023,17 Oktober). Perludem Perbaiki Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen. *MKRI.ID*.Diakses pada 14 Oktober 2025.

⁹ Muhammad Tahir. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan. *Meraja Jurnal*.4(2). hlm 270.

¹⁰ Herman Bakir. (2007). *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung. Refika Aditama. hlm 177.

¹¹ Yustinus Suhardi Ruman. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Jurnal Humaniora*(3)2. hlm 348.

sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.¹²

Pada Konsep keadilan pemilu tidak sebatas pada penegakan pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Dalam pelaksanaannya pemilu dengan penerapan sistem keadilan pemilu yang dirancang perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Sistem keadilan pemilu harus dipandang secara efektif, serta menunjukkan independensi dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kredibilitas ataupun rasa percaya terhadap sistem tersebut akan menurun dan mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu. Desain sistem keadilan pemilu sangat penting sehingga perlu dikaji ulang secara berkala untuk melihat apakah desain tersebut dapat menjamin pemilu yang berkeadilan sebagaimana mestinya asas asas pemilihan umum.

Sila kelima Pancasila menyatakan *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* “Keadilan Sosial” sederhananya keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan dimana rakyat Indonesia memiliki hak yang sama atau persamaan di semua bidang, Soepomo mengatakan, keadilan pada hakikatnya adalah konsekuensi dari negara integralistik dan merefleksikan keinsyafan dan keadilan rakyat seluruhnya.¹³ Dengan demikian, dalam kerangka keadilan sosial yang diadopsi sebagai salah satu sila Pancasila, Hak setiap individu dilindungi dan wajib dihormati setiap orang. Pada saat yang sama, hak hak individu tersebut tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang hidup dalam sebuah negara dengan satu sistem nilai tertentu yang dianut secara Bersama-sama.

2. Prinsip Kedaulatan rakyat pada pemilu sesuai Undang undang

Perubahan ke tiga undang-undang dasar telah merubah pasal 1 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 yang awalnya berbunyi “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*“ yang kemudian berubah menjadi “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*” , perubahan diatas menunjukkan perubahan gagasan serta pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Soewoto Mulyosudarmo mengatakan perubahan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju suatu kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi. Perubahan gagasan ini juga sekaligus diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat kepada penyelenggara kekuasaan Negara, salah satu contohnya mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan rakyat pada lembaga Negara legislatif

¹² International IDEA. (2011). *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta, Indonesia Pinter. Hlm 5.

¹³ Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta, Paradigma. hlm 383.

seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang saat ini telah dipilih melalui pemilihan umum sesuai aturan perundang undangan pada Undang undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Prinsip kedaulatan rakyat dalam undang-undang dasar 1945 juga diiringi dengan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Juga untuk menilai apakah pemilu sudah cukup untuk merepresentasikan kedaulatan rakyat dirasa perlu untuk melihat sistem yang digunakan. Sebenarnya Ide dan teori kedaulatan rakyat sangatlah sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dimana rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.¹⁴

Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin yang dipercayai oleh rakyat.¹⁵

Menurut Peter H Merkl menerangkan terkait syarat syarat terlaksananya demokrasi dengan baik pada suatu Negara.¹⁶ Yang pertama yaitu individualisme bukan berarti mementingkan kepentingan individu agar memperoleh kebebasan yang sebebaskan bebaskan, melainkan individualisme yang dimaksud lebih kepada pemenuhan hak hak fundamental yang secara mutlak dimiliki oleh setiap orang. Kedua sikap kerja sama menegaskan bahwa setiap orang sama di mata hukum sehingga rasa egois serta ingin menang sendiri dihilangkan. Ketiga kemampuan untuk berargumentasi hal ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Negara demokrasi bagaimana Negara mengatur warga negaranya dalam berargumentasi. Selanjutnya yang keempat standar kehidupan yang stabil tolak ukur dari terciptanya kehidupan yang baik dimana angka pendapatan perkapita yang cukup tinggi, Kelima kesempatan dalam ekonomi dan sosial yang wajar, Keenam masyarakat yang beraneka ragam dan bebas bagi Negara berkembang keanekaragaman kultur yang berbeda-beda merupakan hal yang biasa, sehingga dalam pertumbuhan demokrasi memerlukan proses yang cukup lama serta membutuhkan kajian yang serius , supaya tidak ada hak dari setiap individu atau kelompok yang tidak terpenuhi. Ketujuh sikap pengalaman bagaimana Indonesia memiliki pengalaman tersendiri dalam mencapai kemerdekaan, maka dari itu pengalaman sangat di perlukan bagi Indonesia dalam mewujudkan demokrasi demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

3. Sistem Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Dengan Melihat penggunaan sistem pemilihan umum kita bisa melihat sejauh mana konsistensi penyelenggara negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang undang Dasar 1945. Hakekat kedaulatan rakyat dapat dilihat dari bagaimana sistem pemilihan tersebut memberikan ruang partisipasi bagi rakyat semakin terbuka ruang partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemilu maka semakin dekat pula sistem tersebut pada hakikat kedaulatan rakyat. Pemilihan

¹⁴ Hendra Nurtjahjo. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm 32-33.

¹⁵ Kholid O. Santoso, (2009). *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Segi Arsy. hlm 61.

¹⁶ Sukarna. (1990). *Perbandingan Sistem Politik*. Bandung. Pt Citra Aditya Bakti. hlm 26.

umum di Indonesia kerap kali mengalami perubahan sistem dari masa ke masa, salah satunya perubahan sistem pada pemilihan umum tahun 2009 dimana pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24

4. Perubahan sistem pemilihan umum dari masa Ke masa

Pemilihan Umum di Indonesia mengalami perubahan sistem dari masa kemasa pemilu 1955 sebagai pemilihan umum pertama yang dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia, Pada pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1955 hingga tahun 1999 sistem pemilihan) yang digunakan menggunakan sistem proporsional tertutup (*closed List*), yakni peran partai politik dalam pemilu kuat untuk menempatkan calon dan penentuan calon didasarkan oleh nomor urut, Sedangkan pada pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999 juga masih mengadopsi sistem proporsional tertutup hanya merubah varian penentuan calon terpilih dengan mengenalkan model *stabbus accord*, yakni kesepakatan antar parpol bila terdapat sisa suara untuk diberikan pada calon dari parpol dengan nomor urut tertentu berdasarkan kesepakatan pimpinan parpol.¹⁷

Adapun pemilihan umum pada tahun 2004 masih menggunakan sistem yang sama dengan pemilihan umum tahun 1999 yaitu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup dengan menggunakan varian model penentuan kursi berdasarkan perolehan parpol pada daerah pemilihan (Dapil) dan penentuan calon terpilih berdasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), Sistem pemilu ini sebenarnya hendak dipertahankan pada pemilu tahun 2009 namun karena dianggap memperkuat oligarki atau elit partai politik dalam pencalonan, sehingga pada pemilihan umum tahun 2009 digunakan sistem pemilihan umum proporsional terbuka (*open list*) berbasis suara terbanyak. Hal ini di maksudkan agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah seharusnya yang berhak mendapatkan kursi adalah calon dengan perolehan suara terbanyak.¹⁸ Sistem proporsional terbuka dianggap lebih banyak memberikan akses kepada masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum.

5. Penerapan Sistem Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Thershold) di Indonesia

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama ambang batas parlemen (*Parliamentary Thershold*) merupakan aturan yang mengatur terkait batas minimal partai politik untuk menempatkan calon legislatif di parlemen.¹⁹ Aturan ini dianggap sebagai instrumen untuk mengurangi bertumbuhnya partai politik baru dan dilain sisi memperketat jarak ideologis antar partai politik agar artikulasi dan

¹⁷ Maulina Khairunisa & Siti Fatimah.(2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan *Jurnal Tana Mana Universitas Sunan Kalijaga*,4(1).hlm 95.

¹⁸ Riwanto Agus. (2015).Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbannyak Dengan Korupsi Politik di Indonesia.*Jurnal Yustitia, Universitas Sebelas Maret*,4(1),hlm 94-95.

¹⁹ A. F . Adam, W. L. Betaubun, & N. Jalal. (2021). Quo Vadis Parliamentary Thershold di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Musamus Merauke*, 6(1) , hlm 1.

agregasi kepentingan lebih efektif.²⁰ Pengaturan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) Secara teori juga begitu berpengaruh terhadap penataan sistem kepartaian apakah akan membentuk sistem dwi partai atau multi partai sebagai produk hasil pemilihan umum, dalam perjalanan panjang sejarah pemilihan umum di Indonesia pemilihan umum belum pernah menghasilkan produk sistem dwi partai dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, hanya saja pemilihan umum di Indonesia pernah terselenggara dengan kontestan partai politik paling sedikit dengan jumlah 3 (tiga) partai politik di tahun 1977 hingga 1997 dimana pemilihan umum hanya diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia namun hal ini tidak semata mata mengubah sistem kepartaian di Indonesia dan tetap menghasilkan produk pemilihan umumn dengan sistem multi partai.

6. Sejarah Pemilihan Umum dan Pengaruh Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Terhadap Hasil Pemilihan Umum di Indonesia.

Pemilihan umum di Indonesia yang pertama kali dilakukan pada tahun 1955 yang diikuti sebanyak 34 (tiga puluh empat) partai politik, pemilu tahun 1955 terlaksana pasca 10 tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan keluarnya maklumat X yang dikeluarkan pada Januari 1946 oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang belum sempat terselenggara pada tahun yang sama akibat belum adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum, Maklumat ini berisi perintah untuk pembentukan partai politik dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR.²¹

Setelah Pemilihan umum Tahun 1955 Bangsa Indonesia kembali melaksanakan Pemilihan umum pada Tahun 1971 yang merupakan pemilihan umum kedua kalinya diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilihan umum Tahun 1971 dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru tepatnya lima tahun pasca berkuasanya Orde Baru. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli Tahun 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, Pemilihan umum ini menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem terdaftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilihan umum.

Pemilihan umum ketiga diselenggarakan enam tahun setelah pemilihan umum Tahun 1971 yaitu tepatnya pada tahun 1977, Pemilihan umum Tahun 1977 merupakan pemilihan umum terakhir yang tidak menggunakan sistem terjadwal Lima tahun sekali. Pemilihan umum tahun 1977 juga menjadi awal pemilihan umum dengan jumlah peserta partai politik dengan jumlah paling sedikit selama

²⁰ Prihatmoko, J.J. (2008). *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²¹ Roki Eka Putra. (2024, 11 Februari). Ini Sejarah Pemilu di Indonesia Sejak Tahun 1955-2024. RRI News. Diakses pada tanggal 24 april 2025.

penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan jumlah dua partai dan satu golongan karya hingga pemilihan umum tahun 1997.²²

Pemilihan umum tahun 1982 merupakan pemilihan umum dengan sistem Perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel terdaftar namun dengan komposisi yang sedikit berbeda yaitu dengan sebanyak 364 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat) orang dipilih langsung oleh rakyat, sementara 94 (Sembilan Puluh Empat) orang diangkat langsung oleh presiden.

Pemilihan umum tahun 1987 hampir sama dengan pemilihan umum Lima tahun sebelumnya yaitu dengan tetap mempertahankan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel terdaftar.

Pemilihan umum Tahun 1992 pada tahun ini juga sistem yang digunakan masih sama dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel terdaftar.

Pemilihan umum Tahun 1997 merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan di tengah maraknya konflik di Negara Indonesia pemilihan umum tahun 1997 juga merupakan pemilihan umum terakhir pada masa orde baru dimana golongan karya keluar sebagai pemenang pemilihan umum.

Pelaksanaan Pemilihan umum tahun 1999 merupakan pelaksanaan pemilihan umum pertama pada masa reformasi yang dilakukan secara serentak dengan diikuti partai politik sebanyak 48 partai. Pemilihan umum pada tahun 1997 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dengan tetap menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel terdaftar. Dalam aturan Undang - undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum disebutkan besaran ambang batas electoral threshold diangka 2,5%.

Adapun hasil dari pemilihan umum pada tahun 1999 jika dikonversi dari 48 partai politik peserta pemilihan umum hanya 23 partai yang terjaring di DPR, dengan jumlah total perolehan suara 105.553.708 dimana suara yang terkonversi menjadi kursi DPR adalah sebanyak 101.765.683 dengan jumlah suara tidak terpakai atau terbuang sebanyak 3.788.070 atau setara 3,5% suara dari hasil total perolehan suara nasional.

Pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme yang sama dengan pemilihan umum sebelumnya.

Adapun hasil dari pemilihan umum tahun 2004 jika dikonversi dari 24 partai politik peserta pemilihan umum hanya 15 partai yang terjaring dan lolos ke parlemen, dengan jumlah total perolehan suara sah nasional sebesar 113.490.795 dimana suara yang terkonversi menjadi kursi DPR adalah sebanyak 105.923.510 dengan jumlah suara tidak terpakai atau terbuang sebanyak 7.567.285 atau setara 6,5% suara dari hasil total perolehan suara nasional.

Konstalasi politik di parlemen relative tidak berubah meskipun telah ada terobosan melalui pemberlakuan electoral threshold pada pemilu 2004. Pada pemilihan umum kedua pasca orde baru tersebut dihasilkan 16 partai efektif tanpa

²² Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L. W, Ratna Herawati. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal S1 Undip*. 6(2). hlm 5.

kekuatan mayoritas (dari 24 peserta pemilu) dan kembali mengelompok ke dalam 10 fraksi.²³

Pada pemilihan umum tahun 2009 besaran angka ambang batas parlemen berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum ditetapkan sebesar 2,5%

Adapun hasil dari pemilihan umum tahun 2009 jika dikonversi dari 38 partai politik peserta pemilihan umum hanya 9 partai yang terjaring dan lolos ke parlemen, dengan jumlah total perolehan suara sah nasional sebesar 104.048.118 dimana suara yang terkonversi menjadi kursi di DPR adalah sebanyak 185.000.637 dengan jumlah suara tidak terpakai atau terbuang sebanyak 19.047.481 atau setara 18.30% suara dari hasil total perolehan suara nasional. Jumlah suara yang terbuang naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada pemilihan umum tahun 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 ditetapkan ambang batas parlemen sekurang kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah.

Adapun hasil perolehan suara pemilihan umum tahun 2014 jika dikonversi dari 12 partai politik peserta pemilihan umum ada 10 partai yang terjaring dan lolos ke parlemen, dengan jumlah total perolehan suara sah nasional sebesar 124.885.737 dimana suara yang terkonversi menjadi kursi di DPR adalah sebanyak 121.920.762 dengan jumlah suara tidak terpakai atau terbuang sebanyak 2.964.975 atau setara 2,4% suara dari hasil total perolehan suara nasional. Jumlah suara terbuang pada tahun 2014 jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya atau mengalami penurunan.

Sedangkan pada pemilihan umum 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4%, Pada tahun tersebut pemilihan umum dilaksanakan secara serentak dilakukan secara serentak baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.

.Dari hasil suara pemilihan umum pada tahun 2019 jika dikonversi dari 16 partai politik peserta pemilihan umum ada 9 partai yang terjaring dan lolos ke parlemen, dengan jumlah total perolehan suara sah nasional sebesar 139.972.260 dimana suara yang terkonversi menjadi kursi di DPR adalah sebanyak 126.376.418 dengan jumlah suara tidak terpakai atau terbuang sebanyak 13.595.842 atau setara 9,7% suara dari hasil total perolehan suara nasional. Jumlah suara terbuang pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya namun ada penurunan jumlah partai politik yang lolos memenuhi ambang batas parlemen.

Dan yang terbaru pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan dengan sistem yang sama dan angka batas parlemen yang sama yaitu sebesar 4%.

²³ La Ode Husen. (2009). *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika.hlm 62.

Dari data perolehan suara pemilihan umum pada tahun 2024 jika dikonversi dari 18 partai politik peserta pemilihan umum ada 8 partai yang terjaring dan lolos ke parlemen, dengan jumlah total perolehan suara sah nasional sebesar 151.796.631 dimana suara yang terkonversi menjadi kursi di DPR adalah sebanyak 134.492.328 dengan jumlah suara tidak terpakai atau terbuang sebanyak 16.105.152 atau setara 10,6% suara dari hasil total perolehan suara nasional. Jumlah suara terbuang pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya namun ada penurunan jumlah partai politik yang lolos memenuhi ambang batas parlemen.

Tren kenaikan jumlah suara terbuang pada dua kali pemilihan umum terakhir yang menggunakan angka besaran ambang batas parlemen sebanyak 4% mengalami kenaikan yang signifikan namun ada penurunan jumlah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Dari data diatas juga kita bisa mengamati bahwa penerapan ambang batas parlemen menjadi upaya dalam mengurangi jumlah partai politik di Indonesia namun penggunaan ambang batas parlemen yang cukup tinggi juga mempengaruhi jumlah suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi pada parlemen.

Tabel 1

Data Suara Partai Yang Tidak Memenuhi Ambang Batas Parlemen

No	Nama Partai	Suara	%	Tahun
1	Partai Bulan Bintang	1.864.642	1,79	2009
2	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.509	1,47	2009
3	Partai Damai Sejahtera	1.522.032	1.46	2009
4	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.375	1.40	2009
5	Partai Bintang Reformasi	1.264.150	1.21	2009
6	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.950	1.21	2009
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	936.133	0.90	2009
8	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.959	0.86	2009
9	Partai Barisan Nasional	760.712	0.73	2009
10	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.965	0.72	2009
11	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.356	0.65	2009
12	Partai Republika Nusantara	631.814	0.61	2009
13	Partai Persatuan Daerah	553.299	0.53	2009
14	Partai Patriot	547.798	0.53	2009
15	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.856	0.42	2009
16	Partai Kedaulatan	438.030	0.40	2009
17	Partai Pemuda Indonesia	415.563	0.40	2009
18	Partai Matahari Bangsa	351.571	0.34	2009

19	Partai Karya Perjuangan	345.092	0.33	2009
20	Partai Pelopor	325.771	0.31	2009
21	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	321.019	0.31	2009
22	Partai Indonesia Sejahtera	317.433	0.31	2009
23	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	265.369	0.26	2009
24	Partai Buruh	198.803	0.19	2009
25	Partai Persatuan Indonesia Baru	146.831	0.14	2009
27	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	141.558	0.14	2009
28	Partai Sarikat Indonesia	139.988	0.13	2009
29	Partai Merdeka	111.609	0.11	2009
30	Partai Bulan Bintang	1.822.908	1.46	2014
31	Partai Keadialn dan Persatuan Indonesia	1.142.727	0.91	2014
32	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2.67	2019
33	Partai Berkarya	2.929.495	2.09	2019
34	Partai Solidaritas Indonesia	2.651.361	1.89	2019
35	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	1.54	2019
36	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0.79	2019
37	Partai Garuda	702.536	0.50	2019
38	Partai Keadialn dan Persatuan Indonesia	312.775	0.22	2019
39	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3.87	2024
40	Partai Solidaritas Indonesia	4.260.169	2.81	2024
41	Partai Persatuan Indonesia	1.955.154	1.29	2024
42	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.281.991	0.84	2024
43	Partai Hati Nurani Rakyat	1.094.588	0.72	2024
44	Partai Buruh	972.910	0.64	2024
45	Partai Ummat	642.545	0.42	2024
46	Partai Bulan Bintang	484.486	0.32	2024
47	Partai Garda Republik Indonesia	406.883	0.27	2024
48	Partai Kebangkitan Nusantara	326.800	0.22	2024

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum.

B. Representasi suara terbuang pada pemilihan umum 2024

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama jumlah suara sah yang terbuang pada pemilihan umum tahun 2024 yaitu sebanyak 16.105.152 atau setara

10,6% dari suara sah nasional, suara yang terbuang merupakan suara sah nasional yang tidak terkonfersi menjadi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, Suara terbuang tersebut mempengaruhi hasil pemilihan umum secara signifikan, suara terbuang ini menjadi permasalahan yang setiap pemilu menjadi tanda Tanya ,Representasi dari keterwakilan suara calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 menghadapi tantangan terkhusus pada calon anggota legislatif yang tidak dapat duduk pada parlemen walapupun suara yang didapatkan pada Pemilihan umum tahun 2024 relatif tinggi, kemungkinan suasra ataupun aspirasi yang diharapkan oleh simpatisan ataupun masyarakat yang memilih calon tersebut harus hilang diakibatkan kepentingan yang dibawah oleh calon lain belum tentu bisa mengakomodasi atau merepresntasikan aspirasi tersebut akibat dari kepentingan yang datang dari partai politik yang mendapatkan suara mayoritas berfokus pada kepentingan sendiri tanpa memikirkan suara minoritas yang muncul dari npartai dan calon lainnya, ada beberapa calon anggota legislatif yang tidak dapat menduduki kursi parlemen akibat partai mereka tidak memenuhi ambang batas parlemen padahal mereka mendapatkan suara relatif tinggi.

Tabel 2.

Calon Anggota Legislatif Dengan Suara Tinggi Dari Partai Yang Gagal Memenuhi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama Calon	Daerah Pemilihan	Partai	Suara
1	Achmad Baidowi	Jawa Timur XI	PPP	359.189
2	Amir Uskara	Sulawesi Selatan I	PPP	94.287
3	Elly Rachmat Yasin	Jawa Barat V	PPP	99.546
4	TGB Zainul Majdi	Nusa Tenggara Barat II	PERINDO	182.024
5	Grace Natalie	DKI Jakarta III	PSI	193.556
6	Isyana Bagoes Oka	Banten III	PSI	78.140

Sumber : Merdeka.Com Diolah Dari Data Komisi Pemilihan Umum.

Dari data diatas sebanyak 1.006.742 Suara pemilih calon anggota legislatif dengan perolehan suara yang tinggi pada beberapa dapil harus terbuang akibat dan tidak terkonversi menjadi kursi di DPR pada pemilihan umum tahun 2024.

KESIMPULAN DAN SARAN

prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat belum terlaksana sebagaimana mestinya, keadilan yang merupakan hak dasar yaitu untuk dipilih dan memilih tidak terlaksana hak mendasar rakyat atas kedaulatan rakyat tersebut terhalang oleh aturan ambang batas parlemen yang ditrerapkan. Representasi keterwakilan pemilih partai politik dari partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu 2024 tidak dapat terrepresentasikan atau terwakilkan secara menyeluruh akibat dari regulasi ambang batas parlemen yang mengakibatkan calon yang seharusnya terpilih tidak bisa menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga suara pendukungnya harus terbuang atau menjadi suara terbuang.

Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perancang dan pengesahan Undang-undang harus mengkaji lebih lanjut terkait aturan ambang batas parlemen yang berpengaruh pada peningkatan jumlah suara yang terbuang atau tidak terkonfersi menjadai kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, Ambang batas parlemen yang juga membatasi kedaulatan serta berlaku tidak adil pada calon anggota legislatif hal ini dapat terus merugikan tidak hanya bagi calon anggota legislatif tapi juga bagi partai politik dan juga bagi masyarakat secara menyeluruh akibat hak dasar atas kedaulatannya yang tidak terpenuhi.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

REFERENSI

- (1) A.F . Adam, W. L. Betaubun, & N. Jalal. (2021). Quo Vadis Parliementary Thereshold di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Musamus Merauke*, 6(1) , hlm 1.
- (2) Agung Djojosoekarto,Utama Sandjaja. (2008). *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*, Michigan, Partnership for Governance Reform dan Strategic Transformation Institute,hlm 147.
- (3) Arya.(2023,1 Februari). Pengertian Prinsip.*Wikipedia*.Diakses pada tanggal 13 Maret 2025.
- (4) C.F Strong, (2004). *“Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk Bentuk Konstitusi Dunia”*,Bandung, Nuansa,hlm 10.
- (5) Hendra Nurtjahjo. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm 32-33.
- (6) Herman Bakir. (2007). *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung. Refika Aditama. hlm 177.
- (7) International IDEA. (2011). *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta, Indonesia Pinter. Hlm 5.
- (8) Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta, Paradigma. hlm 383.
- (9) Kelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta, Paradigma. hlm 383.
- (10) Kholid O. Santoso, (2009). *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Segi Arsy.hlm 61.
- (11) La Ode Husen. (2009). *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika.hlm 62.
- (12) Maulina Khairunisa & Siti Fatimah.(2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan .*Jurnal Tana Mana Universitas Sunan Kalijaga*,4(1).hlm 95.
- (13) Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L. W, Ratna Herawati. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal S1 Undip*. 6(2). hlm 5.
- (14) Muhammad Tahir. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan. *Meraja Jurnal*.4(2). hlm 270.

- (15) Muhammad Zarwan. (2020). Pengawasan Dana Kampanye, Biaya Politik Tinggi dan Transaksional. *Jurnal Keadilan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat*, 1(2), hlm.1.
- (16) Peter Mahmud Marzuki. (2005), Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, hlm.35.
- (17) Prihatmoko, J.J. (2008). *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (18) Riwanto Agus. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik di Indonesia. *Jurnal Yustitia, Universitas Sebelas Maret*, 4(1), hlm 94-95.
- (19) Roki Eka Putra. (2024, 11 Februari). Ini Sejarah Pemilu di Indonesia Sejak Tahun 1955-2024. RRI News. Diakses pada tanggal 24 april 2025.
- (20) Sukarna. (1990). *Perbandingan Sistem Politik*. Bandung. Pt Citra Aditya Bakti. hlm 26.
- (21) Utami Argawati. (2023, 17 Oktober). Perludem Perbaiki Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen. *MKRI.ID*. Diakses pada 14 Oktober 2025.
- (22) Yogo Pamungkas. (2014). "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-undang Dasar 1945", *Jurnal Rechts Vinding*, 1(3), hlm.34.
- (23) Yustinus Suhardi Ruman. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Jurnal Humaniora*(3)2. hlm 348.